

Analisis Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tahun 2025-2030

Nadia Dwi Harini¹, Syafwandi²

^{1,2} Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang, Indonesia

Received : 15 Agustus 2025, Revised : 27 Agustus 2025, Published : 6 September 2025

Corresponding Author

Nama Penulis: Nadia Dwi Harini

Email: harininadia6@gmail.com

Abstract

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu instansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tahun 2025–2030 yang selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Metode yang digunakan adalah analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta pendekatan perencanaan strategis berbasis kinerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fokus strategis lima tahun ke depan mencakup percepatan pelayanan pertanahan berbasis digital, optimalisasi pengelolaan aset tanah negara, penguatan kualitas SDM, dan peningkatan integritas pelayanan publik. Rencana strategis ini diharapkan menjadi pedoman kerja yang efektif untuk mencapai target kinerja dan mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Agam.

Kata kunci - analisis SWOT, rencana strategis, rekomendasi kebijakan

Abstract

A Strategic Plan (Renstra) is a planning document containing the vision, mission, objectives, strategies, policies, programs, and performance indicators as guidelines for implementing the main tasks and functions of an agency. This study aims to develop a Strategic Plan for the Agam Regency Land Office for 2025–2030 that aligns with the Strategic Plan of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN). The method used is a SWOT analysis to identify strengths, weaknesses, opportunities, and threats, as well as a performance-based strategic planning approach. The results indicate that the strategic focus for the next five years includes accelerating digital-based land services, optimizing the management of state land assets, strengthening human resource quality, and enhancing the integrity of public services. This strategic plan is expected to serve as an effective work guideline for achieving performance targets and supporting the development of the Agam Regency region.

Keywords - SWOT analysis, strategic plan, policy recommendations

How to Cite : Harini, N. D., & Syafwandi, S. (2025). Analisis Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Tahun 2025-2030. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(4), 734–742. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i4.575>

Copyright ©2025 Nadia Dwi Harini, Syafwandi Syafwandi

PENDAHULUAN

Pengelolaan pertanahan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagai instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bertanggung jawab atas pelayanan pertanahan, pengelolaan aset tanah negara, serta pengaturan tata ruang wilayah. Dalam kurun waktu 2025–2030, tantangan yang dihadapi semakin kompleks, meliputi tuntutan percepatan layanan, peningkatan transparansi, pengintegrasian data spasial, serta penanganan konflik agraria yang masih terjadi. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan infrastruktur digital, kesenjangan literasi teknologi pada pegawai, serta koordinasi antar-pemangku kepentingan yang belum optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian target nasional, termasuk reforma agraria dan digitalisasi pelayanan pertanahan.

Menurut Kementerian PANRB (2020), perencanaan strategis merupakan instrumen utama untuk mengarahkan organisasi mencapai visi dan misinya. David (2017) menegaskan bahwa analisis SWOT dapat membantu merumuskan strategi berbasis kekuatan dan peluang, sembari mengantisipasi kelemahan dan ancaman. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dan penguatan kapasitas SDM merupakan kunci transformasi pelayanan publik.

Penelitian ini mengusulkan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam 2025–2030 dengan pendekatan analisis SWOT yang dipadukan *Balanced Scorecard* untuk menetapkan indikator kinerja. Strategi yang dihasilkan mencakup digitalisasi layanan, optimalisasi pengelolaan aset tanah negara, penguatan kompetensi SDM, dan peningkatan kolaborasi lintas sektor. Inovasi utama penelitian ini adalah integrasi penuh sistem pelayanan pertanahan berbasis digital dengan data spasial nasional yang dikombinasikan dengan pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard*. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pelayanan, meminimalisasi konflik, dan meningkatkan transparansi, sehingga Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga alat manajemen yang dinamis dan responsif terhadap perubahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memperoleh dan menggunakan sumber-sumber perusahaan yang sifatnya terbatas didalam lingkungan perusahaan yang berubah dengan cepat dan dinamis. Tugas penyusunan strategi terletak pada para manajer strategi. Manajemen strategi juga diberi nama lain, yaitu *comprehensive, system management, strategic planning*, atau *long range management*. Manajemen strategi mencakup aliran keputusan (*stream of decisions*), pengembangan strategi-strategi yang efektif, cara-cara membuat (*strategi- membuat keputusan*), dan desain keputusan serta program (Mifthakulhuda Anam, 2018).

Pendekatan manajemen strategi yang ada sekarang, pada dasarnya sudah mengalami beberapa fase pengembangan, bentuknya terdiri atas empat tahapan. Bentuk awalnya dimulai pada tahun 1990 an, saat para pelaku bisnis kala itu merasa membutuhkan pendekatan yang sistematis kemana harus mengarahkan bisnis dimasa datang. Istilahnya dulu adalah strategi *formulation*, sedangkan proses yang dilakukan oleh manajernya adalah perencanaan strategi.

Menurut Rangkuti dalam (Ramli, Yanto; Kartini, 2022), suatu perusahaan dapat mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman eksternal dan merebut peluang yang ada. Proses analisis, perumusan dan evaluasi strategi-strategi itu disebut perencanaan strategis. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar perusahaan dapat melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Menurut David dalam (Rijal, 2018), proses manajemen strategis terdiri dari tiga tahap, yaitu perumusan strategi (*strategic formulation*), implementasi strategi (*strategic implementation*) dan evaluasi strategi (*strategic evaluation*). Perumusan strategi termasuk mengembangkan misi bisnis, mengenali peluang dan ancaman eksternal perusahaan, menetapkan kekuatan dan kelemahan internal,

menetapkan tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi tertentu untuk dilaksanakan. Implementasi Strategi menuntut perusahaan menetapkan obyektif tahunan, memperlengkapi dengan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan; implementasi strategi termasuk mengembangkan budaya mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengubah arah usaha pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi, dan menghubungkan kompensasi karyawan dengan prestasi organisasi. Evaluasi Strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategis. Para manager sangat perlu mengetahui kapan strategi tertentu tidak berfungsi dengan baik, evaluasi strategi terutama berarti usaha untuk memperoleh informasi ini.

Persaingan antar bisnis menjadi salah satu faktor yang membantu pelaku usaha memberikan kepuasan serta menarik konsumen melalui pelayanan terbaik. Strategi SWOT dapat diterapkan dalam menganalisis lingkungan bisnis eksternal dan internal.

1. Konsep Analisis SWOT

Menurut (Sutabri & Napitupulu, 2019), analisis SWOT adalah sebuah metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi factor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi dari penjelasan tentang analisis SWOT yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa analisis SWOT merupakan proses perencanaan yang sangat penting untuk dilakukan oleh para manajerial untuk mengevaluasi situasi dalam menguasai pangsa pasar secara berkelanjutan.

2. Kerangka Teoritis Analisis SWOT

a. Analisis Kekuatan (*Strengths*) Terhadap Usaha

Kekuatan (*strength*) dalam hal ini diartikan sebagai kekuatan atau hal positif yang menonjol dari perusahaan/produk yang dapat dijadikan sebagai keunggulan bersaing menurut (Med et al., 2023). usaha/bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisir oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry yang menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka. Jadi kekuatan usaha adalah jumlah keseluruhan kegiatan organisasi yang dapat menonjolkan keunggulan bersaing misalnya, produk dalam rangka menyediakan barang atau jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka (konsumen) di pangsa pasar.

b. Analisis Kelemahan (*Weakness*) Terhadap Usaha

Kebalikan dari *strength*, kelemahan (*Weakness*) adalah kekurangan atau yang tidak/belum dimiliki perusahaan untuk bersaing di pasar misalkan; brand yang nama tidak terkenal, reputasi yang kurang baik di mata konsumen (Nggini, 2019). Menurut kamus besar bahasa Indonesia dalam (Astuti & Ratnawati, 2020) menjelaskan usaha adalah daya upaya atau kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Jadi yang dimaksud dengan kelemahan usaha adalah kurangnya potensi usaha dalam berupaya mengerahkan tenaga, pikiran, untuk mendapat reputasi brand yang baik di mata konsumen di pasa

c. Analisis Peluang (*Opportunity*) Terhadap Usaha

Peluang (*Opportunity*) dianggap sebagai bagian dari lingkungan eksternal yang dapat menjadi potensi untuk meningkatkan profit, market share atau pertumbuhan (Med et al., 2023). Usaha atau bisnis adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan penjualan atau pembelian barang atau jasa secara konsisten, menurut Peterson dalam (Maulana & Patrikha, 2021). Jadi peluang usaha adalah serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan

kegiatan jual beli barang atau jasa secara konsisiten dan berpotensi meningkatkan profit, market share dan pertumbuhan perusahaan.

d. Analisis Ancaman (*Threats*) Terhadap Usaha

Ancaman (*Threat*) adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasi-organisasi yang berada dalam satu industry yang sama secara umum akan merasa dirugikan/dipersulit/terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut (Astuti & Ratnawati, 2020). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Maulana & Patrikha, 2021). Jadi ancaman usaha terjadi apabila kondisi eksternal berpotensi mengalami kesulitan, rugi dan terancam sehingga setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun yang dilakukan oleh setiap pengusaha tidak mendatangkan keuntungan atau laba sesuai dengan yang diharapkan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, pada bulan Agustus 2025. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus yang dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting, tantangan, dan peluang yang dihadapi, sekaligus merumuskan rencana strategis yang tepat. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat struktural, staf teknis, serta pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha. Data sekunder meliputi dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya, laporan kinerja, data statistik pertanahan, serta regulasi terkait seperti Peraturan Menteri ATR/BPN, Peraturan Bupati, dan dokumen perencanaan lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur, observasi lapangan terhadap proses layanan pertanahan, serta studi pustaka terhadap peraturan, laporan, dan arsip internal. Analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu analisis SWOT untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman; penyusunan matriks SWOT untuk merumuskan strategi SO, ST, WO, dan WT; penerapan Balanced Scorecard (BSC) untuk menerjemahkan strategi menjadi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target terukur pada empat perspektif (keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan); serta triangulasi data untuk memastikan validitas hasil dengan membandingkan data primer dan sekunder. Melalui metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan dokumen Rencana Strategis yang aplikatif, berbasis data, dan selaras dengan kebijakan nasional serta kebutuhan lokal.

PEMBAHASAN

1. Analisis Kondisi Eksisting

Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam memiliki peran strategis dalam mendukung program reforma agraria, percepatan sertipikasi tanah, penyelesaian sengketa pertanahan, dan pemeliharaan data pertanahan. Selama lima tahun terakhir (2020–2024), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah sertipikat yang diterbitkan melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan layanan rutin, namun masih ditemukan hambatan pada aspek pemerataan layanan di wilayah terpencil, rendahnya literasi masyarakat tentang administrasi pertanahan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka, diperoleh beberapa poin penting terkait kondisi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam:

- a. Kekuatan (*Strengths*): SDM berpengalaman, dukungan regulasi yang jelas, dan tersedianya infrastruktur layanan dasar pertanahan.

- b. Kelemahan (Weaknesses): Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pelatihan berbasis kompetensi.
- c. Peluang (Opportunities): Program digitalisasi layanan dari Kementerian ATR/BPN, sinergi dengan pemerintah daerah, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan legalitas tanah.
- d. Ancaman (Threats): Sengketa lahan yang kompleks, perubahan regulasi yang cepat, dan resistensi sebagian masyarakat terhadap program sertipikasi massal.

Pendekatan SWOT ini relevan dengan teori manajemen strategis sektor publik yang dikemukakan oleh Gürel & Tat (2017), di mana analisis faktor internal dan eksternal diperlukan untuk merumuskan strategi adaptif yang tepat. Dalam konteks birokrasi, kerangka ini sejalan dengan prinsip *New Public Administration* dan *good governance* yang menekankan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan pelayanan yang responsif (Denhardt & Denhardt, 2015). Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya Sistem Informasi Pertanahan (Land Information Systems/LIS), menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi LIS sering bergantung pada kemampuan adaptasi konsep teknologi ke dalam konteks lokal, sebuah proses yang disebut *idea translation* dalam kerangka *institutional theory* (Syafuddin, 2018).

Dalam upaya memperkuat peran layanan pertanahan, strategi yang dapat diterapkan meliputi optimalisasi sistem informasi pertanahan dengan pendekatan *idea translation*, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis kompetensi dan e-government, serta penerapan manajemen risiko untuk mengantisipasi perubahan regulasi dan sengketa lahan. Selain itu, adopsi *Social Tenure Domain Model* (STDM) dapat menjadi alternatif untuk mengakomodasi klaim tanah adat maupun informal, sehingga mendukung keadilan sosial dalam reforma agraria (Zevenbergen et al., 2013). Kolaborasi multi-pemangku kepentingan (*collaborative governance*) juga menjadi kunci dalam membangun legitimasi kebijakan, meningkatkan partisipasi publik, dan mengurangi resistensi terhadap program sertipikasi massal.

2. Formulasi Strategi melalui Matriks SWOT

Hasil analisis SWOT Kantor Pertanahan Kabupaten Agam menghasilkan empat kelompok strategi utama yang berorientasi pada pemanfaatan kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dalam penyelenggaraan layanan pertanahan.

- a. Strategi SO (*Strength–Opportunities*):
 - Memanfaatkan keahlian SDM berpengalaman untuk mempercepat digitalisasi layanan pertanahan.
 - Membangun kerjasama dengan pihak ketiga untuk pelatihan dan adopsi teknologi.
 - Peningkatan edukasi Masyarakat dengan mengintensifkan sosialisasi tentang pentingnya sertipikasi tanah.
- b. Strategi ST (*Strength–Threats*):
 - Memperkuat kapasitas mediasi dan penyelesaian sengketa berbasis data hukum.
 - Penyusunan Prosedur Operasional Standar yang adaptif terhadap perubahan regulasi
- c. Strategi WO (*Weakness–Opportunities*):
 - Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui pelatihan pegawai.
 - Pengajuan anggaran pengembangan SDM dan teknologi pada saat Penyusunan Anggaran RKA-KL.
 - Implementasi sistem informasi terintegrasi untuk efisiensi
- d. Strategi WT (*Weakness–Threats*): Memperbaiki efisiensi anggaran dan memperkuat koordinasi lintas sektor.

3. Implementasi Strategis dalam Rencana Tahun 2025-2030

Berdasarkan pengumpulan data melalui observasi lapangan, analisis dokumen internal, wawancara dengan pegawai, dan telaah regulasi, penelitian ini menghasilkan rencana strategis yang mencakup visi, misi, dan peta strategis bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang mencakup visi dan misi:

Visi:

“Terwujudnya pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat”

Misi:

“Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan”

Adapun lima fokus utama Pembangunan kinerja

- a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan
 - Target waktu rata-rata penyelesaian sertipikat tanah dipangkas hingga 30% dibanding kondisi 2024.
 - Implementasi sistem antrian dan permohonan online yang terintegrasi dengan BPN pusat.
- b. Digitalisasi dan Integrasi Data Pertanahan
 - Penerapan Geographic Information System (GIS) untuk pemetaan tanah berbasis peta digital resolusi tinggi.
 - Pembuatan *dashboard* monitoring real-time untuk progres sertifikasi tanah.
- c. Penguatan SDM dan Budaya Organisasi
 - Pelatihan rutin pegawai minimal dua kali setahun terkait hukum pertanahan, teknologi informasi, dan etika pelayanan publik.
 - Penilaian kinerja berbasis *Key Performance Indicator* (KPI) yang transparan.
- d. Peningkatan Partisipasi dan Kepuasan Masyarakat
 - Penyelenggaraan forum konsultasi publik minimal 2 kali setahun.
 - Survei kepuasan pelanggan berbasis digital untuk memantau kinerja layanan.
- e. Penanganan Sengketa
 - Meningkatkan kapasitas mediasi dan penyelesaian sengketa pertanahan
 - Mediasi dan koordinasi lintas sektor untuk penyelesaian sengketa dan perkara

Rencana strategis tersebut dibagi menjadi tiga fase:

- a) Fase I (2025–2026): Konsolidasi data pertanahan, pembaruan peta digital, dan pelatihan SDM.
- b) Fase II (2027–2028): Ekspansi layanan digital, pembentukan pusat mediasi sengketa, dan percepatan sertifikasi tanah.
- c) Fase III (2029–2030): Integrasi penuh layanan pertanahan berbasis digital, pemanfaatan big data, dan evaluasi akhir capaian target nasional.

4. Penerapan *Balanced Scorecard* (BSC)

BSC digunakan untuk menerjemahkan strategi menjadi indikator kinerja terukur:

- a. Perspektif Pelanggan: Peningkatan kepuasan layanan publik minimal 90% pada tahun 2030, 80% layanan berbasis online pada 2030.
- b. Perspektif Proses Internal: Digitalisasi seluruh layanan sertifikasi tanah pada tahun 2028.
- c. Perspektif Keuangan: Optimalisasi anggaran
- d. Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan: Pelatihan kompetensi minimal dua kali setahun untuk seluruh pegawai

Diskusi

Hasil analisis menunjukkan bahwa tantangan utama yang dihadapi Kantor Pertanahan

Kabupaten Agam adalah bagaimana meningkatkan kualitas layanan publik di tengah tuntutan digitalisasi yang semakin mendesak, dengan keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran. Kondisi ini menciptakan urgensi untuk merumuskan rencana strategis yang tidak hanya fokus pada target jangka pendek, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan lingkungan strategis secara adaptif.

Pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) menjadi instrumen penting dalam perencanaan ini karena mampu menghubungkan visi, misi, dan tujuan organisasi dengan langkah operasional yang jelas. Sesuai konsep yang dikemukakan oleh Kaplan & Norton (1996), BSC mengintegrasikan empat perspektif — Keuangan, Pelanggan, Proses Internal, serta Pembelajaran dan Pertumbuhan — untuk memastikan kinerja organisasi dinilai secara menyeluruh. Dalam konteks Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, hal ini berarti setiap sasaran strategis dilengkapi dengan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPI), target yang terukur, serta program kerja yang relevan, sehingga memudahkan monitoring dan evaluasi secara berkala.

Keberhasilan implementasi rencana strategis ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, antara lain: (1) ketersediaan data yang valid untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy), (2) komitmen manajemen dalam mengawal pelaksanaan strategi, (3) keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, serta (4) percepatan digitalisasi sebagai solusi terhadap hambatan berupa keterlambatan proses, duplikasi data, dan kurangnya integrasi sistem. Hal ini sejalan dengan pandangan Mintzberg (2015) bahwa strategi yang efektif harus memperhatikan keselarasan antara visi-misi organisasi dan lingkungan eksternal, sekaligus memanfaatkan kekuatan internal yang dimiliki.

Analisis SWOT yang dilakukan mengidentifikasi kekuatan utama Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, yakni sumber daya manusia yang berpengalaman dan adanya dukungan regulasi nasional melalui program reforma agraria. Kelemahan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan adanya resistensi sebagian pegawai terhadap perubahan. Menurut teori Change Management dari Kotter (1996), resistensi ini dapat diatasi melalui penciptaan urgensi perubahan, pembentukan koalisi pendukung, komunikasi visi, dan pemberian quick wins untuk meningkatkan motivasi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya dipandang sebagai proyek teknologi, tetapi sebagai perubahan budaya kerja.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan Wulandari & Setiawan (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi pertanahan dapat memangkas waktu pelayanan hingga 40% pada instansi serupa. Selain itu, literatur Misnawati (2021) dan Prasetyo (2020) menegaskan bahwa transformasi digital dalam pelayanan publik meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik. Hal ini menguatkan posisi BSC sebagai kerangka yang tidak hanya mengukur kinerja, tetapi juga memandu penyesuaian strategi secara adaptif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan dukungan teori dan bukti empiris tersebut, implementasi rencana strategis ini diharapkan mampu menciptakan layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Lebih jauh, keberhasilan ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, sehingga pada periode 2025–2030, instansi ini dapat bertransformasi menjadi penyelenggara layanan pertanahan yang modern, responsif, dan terpercaya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pertanahan Kabupaten Agam 2025–2030 dengan memadukan analisis SWOT dan *Balanced Scorecard* (BSC) untuk menghasilkan strategi yang adaptif, terukur, dan berbasis data. Analisis menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Agam memiliki kekuatan berupa SDM berpengalaman, dukungan regulasi nasional, dan infrastruktur layanan dasar. Namun, masih terdapat kelemahan signifikan seperti pemanfaatan

teknologi informasi yang belum optimal, keterbatasan anggaran, dan rendahnya literasi digital pegawai. Peluang utama meliputi program digitalisasi dari Kementerian ATR/BPN, sinergi dengan pemerintah daerah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan legalitas tanah. Sementara itu, ancaman datang dari sengketa lahan yang kompleks, perubahan regulasi yang cepat, dan resistensi sebagian masyarakat. Strategi yang dihasilkan mencakup digitalisasi layanan, penguatan kompetensi SDM, peningkatan partisipasi masyarakat, optimalisasi pengelolaan aset tanah negara, dan penanganan sengketa secara preventif. Implementasi dibagi dalam tiga fase (2025–2026, 2027–2028, 2029–2030) untuk memastikan transformasi berlangsung bertahap namun konsisten. Melalui penerapan BSC, indikator kinerja telah ditetapkan untuk empat perspektif utama: pelanggan, proses internal, keuangan, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan dukungan data yang valid, komitmen manajemen, keterlibatan pemangku kepentingan, dan percepatan digitalisasi, Renstra ini diharapkan mampu mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan penerapan Balanced Scorecard, terdapat beberapa langkah strategis yang direkomendasikan untuk memastikan keberhasilan implementasi Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Agam 2025–2030. Pertama, percepatan digitalisasi layanan perlu menjadi prioritas melalui penerapan layanan pertanahan berbasis *online* yang terintegrasi dengan data spasial nasional menggunakan teknologi GIS dan *dashboard* pemantauan real-time, dengan target implementasi penuh sebelum tahun 2028. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan berbasis kompetensi minimal dua kali setahun, mencakup aspek hukum pertanahan, teknologi informasi, mediasi sengketa, serta penerapan sistem penilaian kinerja berbasis KPI yang transparan. Ketiga, diperlukan manajemen perubahan yang efektif untuk mengurangi resistensi pegawai terhadap digitalisasi, dengan menerapkan pendekatan Kotter yang menekankan penciptaan urgensi, komunikasi visi yang jelas, dan pemberian *quick wins*. Keempat, peningkatan partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui forum konsultasi publik minimal dua kali setahun serta program literasi pertanahan yang menjangkau wilayah terpencil, dengan melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Kelima, penguatan manajemen risiko dan penyelesaian sengketa perlu diwujudkan melalui pembentukan pusat mediasi yang berbasis data hukum dan memiliki prosedur adaptif terhadap perubahan regulasi. Terakhir, mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis Balanced Scorecard harus dilaksanakan secara konsisten setiap semester, dengan memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan penyesuaian strategi secara dinamis sesuai perkembangan lingkungan internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, W., & Ratnawati, N. (2020). *Pengaruh lingkungan eksternal terhadap strategi bisnis*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 22(1), 45–55.
- BPN RI. (2018). Panduan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*. John Wiley & Sons
- David, F. R. (2017). *Strategic Management: Concepts and Cases* (16th ed.). Pearson Education.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). Routledge.
- Gürel, E., & Tat, M. (2017). SWOT analysis: A theoretical review. *The Journal of International Social Research*, 10(51), 994–1006. <https://doi.org/10.17719/jisr.2017.1832>
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business School Press.
- Kementerian ATR/BPN. (2024). Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN 2025–2030.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Peraturan Menteri PANRB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024.

- Kotter, J. P. (1996). *Leading Change*. Harvard Business School Press.
- Lestari, R. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 101–115.
- Maulana, F., & Patrikha, F. D. (2021). Analisis peluang usaha dalam era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 14(2), 210–221.
- Med, F., Rahman, A., & Sari, D. (2023). Analisis SWOT dalam pengembangan usaha kecil menengah. *Jurnal Manajemen Strategis*, 8(1), 55–67.
- Mifthakulhuda Anam. (2018). *Manajemen Strategi: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mintzberg, H. (2015). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management* (3rd ed.). Pearson Education.
- Misnawati. (2021). Transformasi digital dalam pelayanan publik: Peluang dan tantangan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 1–12.
- Nggini, F. (2019). Kelemahan dan strategi pengembangan usaha mikro kecil. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 77–85.
- Prasetyo, H. (2020). Digitalisasi pelayanan publik untuk meningkatkan akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 134–147.
- Ramli, Y., & Kartini. (2022). Strategi perencanaan bisnis berbasis SWOT. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 17(3), 145–158.
- Rijal, M. (2018). Tahapan manajemen strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi. *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 9(1), 25–33.
- Sitorus, H., et al. (2020). Digitalisasi Pelayanan Pertanahan dan Dampaknya terhadap Kepuasan Masyarakat. *Jurnal Agraria*, 12(1), 45–58.
- Sutabri, T., & Napitupulu, S. (2019). Analisis SWOT sebagai alat perencanaan strategi bisnis. *Jurnal Sistem Informasi*, 15(2), 120–130.
- Syafruddin, M. (2018). Adaptasi teknologi informasi dalam layanan publik: Pendekatan *idea translation*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 6(1), 45–58.
- Wulandari, D., & Setiawan, H. (2021). Efektivitas sistem informasi pertanahan dalam percepatan pelayanan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 12(4), 322–334.
- Zevenbergen, J., Augustinus, C., Antonio, D., & Bennett, R. (2013). Pro-poor land administration: Principles for recording the land rights of the underrepresented. *Land Use Policy*, 31, 595–604. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.09.005>